



**DAFTAR ISI**

|   |     |
|---|-----|
| <b>Pernyataan Tanggung Jawab Kepala SKPD</b> .....  | ii  |
| <b>Kata Pengantar</b> .....   | iii |
| <b>Laporan Keuangan Akhir Tahun</b> .....   | iv  |
| <b>- Catatan atas Laporan Keuangan SKPD</b> .....   | 1   |
| <br>  |     |
| <b>Bab I Pendahuluan</b> .....  | 1   |
| <b>1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD</b> .....  | 1   |
| <b>1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD</b> .....   | 1   |
| <b>1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD</b> .....  | 5   |
| <b>Bab II Penjelasan Pos-pos laporan keuangan SKPD</b> .....  | 7   |
| <b>2.1. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan</b> ..  | 7   |
| 2.1.1. Pendapatan .....   | 7   |
| 2.1.2. Belanja .....  | 7   |
| 2.1.3. Aset .....   | 8   |
| <b>2.2. Pengungkapan batas atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan realisasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD</b> ..... | 9   |
| <br>  |     |
| <b>Bab III Penutup</b> .....  | 10  |
| <br>  |     |
| <b>Lampiran-lampiran</b>  |     |



**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
KEPALA SATUAN KERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari : Laporan Ralisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan Akhir Tahun Tahun Anggaran 2022 sebagaimana pun terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Barru, 31 Desember 2022

Ketua Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Barru

DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL

**Drs. NASARUDDIN, M.Si**

NIP: 19600127 198712 2 001



## KATA PENGANTAR

Undang - Undang di bidang Keuangan mengamanatkan agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban yang berupa Laporan Keuangan Kabupaten yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Atas dasar tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2022 disadari masing - masing terdapat kekurangan didalamnya, namun sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dituntut harus dapat menyajikan Laporan Keuangan sebagai bahan informasi yang transparan, akuntabel, konsistensi, akurat, dan mudah dimengerti.

Kekurangan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini akan disempurnakan secara bertahap sesuai dengan kondisi pelaksanaan pemerintah dan pertanggungjawaban pelaksanaannya.

Barru, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Barru

  
**Drs. NASARUDDIN, M.Si**

Nip: 19600127 198712 2 001



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### 1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

###### - Maksud

Laporan Keuangan Akhir Tahun merupakan Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dalam satu tahun anggaran dan disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari :

- Laporan Realisasi Anggaran SKPD
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Laporan Keuangan Akhir Tahun disusun dengan maksud memberikan gambaran dan pengelolaan mengenai realisasi anggaran dan arus kas serta kinerja keuangan suatu ekuitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga merupakan salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru.

###### - Tujuan

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD bertujuan untuk menyampaikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas SKPD atas sumber daya yang dipercayakan.

##### 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Akhir Tahun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru disusun dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :



1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara



- Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2010 (lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 10, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5155);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD**

Adapun Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.2. Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

#### **Bab II Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

- 2.1. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
  - 2.1.1. Pendapatan
  - 2.1.2. Belanja
  - 2.1.3. Asset
- 2.2. Pengungkapan batas atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan realisasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

#### **Bab III Penutup**

##### **Lampiran-lampiran**

- Laporan Realisasi Anggaran





**BAB II**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

**2.1. Rincian dari Penjelasan masing - masing Pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD**

**2.1.1. Pendapatan Asli Daerah**

**1. Pendapatan Retribusi Daerah**

Dalam tahun anggaran 2022 realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Rp. 0,- atau sebesar 0 % dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 0,-

| No. | Obyek Pendapatan                 | Rencana (Rp) | Realisasi (Rp) | % | % Kontribusi |
|-----|----------------------------------|--------------|----------------|---|--------------|
|     | <b><u>RETRIBUSI DAERAH</u></b>   |              |                |   |              |
| 1   | Retribusi Penggantian KTP dan KK | 0            | 0              | 0 |              |
| 2   | Jumlah                           | 0            | 0              | 0 |              |

**2.1.2. Belanja**

**1. Belanja Operasi**

**a) Belanja Pegawai**

Dalam Tahun Anggaran 2022 realisasi Belanja Pegawai mencapai **Rp. 2.177.739.225,-** atau sebesar **88,12 %** dari target anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 2.471.275.276,-**. Dari jumlah realisasi Belanja Pegawai sebesar **Rp. 2.177.739.225,-** masing-masing kelompok Belanja Pegawai mendapatkan alokasi sebagai berikut :

| No | Kelompok Belanja              | Rencana (Rp)                | Realisasi (Rp)              | %                    | % Kontribusi |
|----|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
|    | <b><u>Belanja Pegawai</u></b> | <b><u>2.471.275.276</u></b> | <b><u>2.177.739.225</u></b> | <b><u>88,12%</u></b> |              |
| 1  | Gaji dan Tunjangan Pegawai    | 2.015.192.916               | 1.782.638.302               | 88,46%               |              |
| 2  | Tambahan Penghasilan Pegawai  | 456.082.360                 | 395.100.923                 | 86,63%               |              |



**b) Belanja Barang dan Jasa**

Dalam tahun anggaran 2022 realisasi Belanja Barang mencapai Rp. **1.151.508.340,-** atau sebesar **93,99 %** dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. **1.225.081.650,-** Dari jumlah realisasi Belanja Barang sebesar Rp. **1.151.508.340,-** masing-masing kelompok Belanja Barang mendapatkan alokasi sebagai berikut :

| No. | Kelompok Belanja                         | Rencana (Rp)         | Realisasi (Rp)       | %             | % Kontribusi |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
|     | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>           | <b>1.225.081.650</b> | <b>1.151.508.340</b> | <b>93,99%</b> |              |
| 1   | Belanja bahan pakai habis                | 395.656.650          | 385.368.035          | 97,40%        |              |
| 2   | Belanja jasa kantor                      | 380.969.000          | 353.986.135          | 92,92%        |              |
| 3   | Belanja Kursus/Pelatihan                 | 22.500.000           | 19.700.000           | 87,56%        |              |
| 4   | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 49.710.000           | 39.875.000           | 80,22%        |              |
| 6   | Belanja Perjalanan Dinas                 | 376.246.000          | 352.579.170          | 93,71%        |              |

**c) Belanja Modal**

Dalam Tahun Anggaran 2022 realisasi Belanja Modal mencapai Rp. **40.005.000,-** atau sebesar **42,51 %** dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. **94.105.000,-**. Dari jumlah realisasi Belanja Modal sebesar Rp. **40.005.000,-** masing-masing kelompok Belanja Modal mendapatkan alokasi sebagai berikut :

| No. | Kelompok Belanja                    | Rencana           | Realisasi         | %             | % Kontribusi |
|-----|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
|     | <b>Belanja Modal</b>                | <b>94.105.000</b> | <b>40.005.000</b> | <b>42,51%</b> |              |
| 1   | Belanja Tanah                       | -                 |                   | 0.00%         |              |
| 2   | Belanja Peralatan dan mesin         | 94.105.000        | 40.005.000        | 42,51%        |              |
| 3   | Belanja Gedung dan Bangunan         | -                 |                   | 0.00%         |              |
| 4   | Belanja Jalan, irigasi dan Jaringan | -                 |                   | 0.00%         |              |
| 5   | Belanja Aset Lainnya                | -                 |                   | 0.00%         |              |



2.2. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsilasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang menggunakan Basis AkruaI pada SKPD.

2.2.1. **Penjelasan Pos-Pos Neraca**

2.2.1.1. **Kas**

Jumlah Kas di Bendahara Penerima Rp. N i h i l,- merupakan saldo per 31 Desember 2022, sedangkan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. N i h i l,-

2.2.1.2. **Piutang Lainnya**

Piutang Lainnya sebesar Rp. N i h i l,- adalah merupakan saldo piutang lainnya per 31 Desember 2022.

2.2.1.3. **Persediaan**

Persediaan sebesar Rp. N i h i l,- adalah merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2022.



### BAB III

#### PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang dituangkan dalam RPJMD sebagaimana yang diamanatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam Tahun Anggaran 2022 tidak ada Pendapatan daerah yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Realisasi Belanja Daerah yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai **Rp. 3.369.252.565,-** atau sebesar **88,89 %** dari rencana anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 3.790.461.926,-**

Demikian Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2022, dibuat untuk menjadi Laporan Keccuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Barru, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Barru

  
**Drs. NASARUDDIN, M.Si**

NIP. 19600127 198712 2 001



PEMERINTAHAN KAB. BARRU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022  
01 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022



| Kode Rekening | URAIAN                            | ANGGARAN 2022            | REALISASI 2022              | % 2022            | REALISASI 2021 |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| 1             | 2                                 | 3                        | 4                           | 5 = (4 / 3) * 100 | 6              |
| 5             | <b>BELANJA DAERAH</b>             | <b>3.790.461.926</b>     | <b>3.369.252.565,00</b>     | <b>88,89</b>      | <b>0,00</b>    |
| 5.1           | <b>BELANJA OPERASI</b>            | <b>3.696.356.926</b>     | <b>3.329.247.565,00</b>     | <b>90,07</b>      | <b>0,00</b>    |
| 5.1.01        | Belanja Pegawai                   | 2.471.275.276            | 2.177.739.225,00            | 88,12             | 0,00           |
| 5.1.02        | Belanja Barang dan Jasa           | 1.225.081.650            | 1.151.508.340,00            | 93,99             | 0,00           |
|               | <b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>     | <b>3.696.356.926</b>     | <b>3.329.247.565,00</b>     | <b>90,07</b>      | <b>0,00</b>    |
| 5.2           | <b>BELANJA MODAL</b>              | <b>94.105.000</b>        | <b>40.005.000,00</b>        | <b>42,51</b>      | <b>0,00</b>    |
| 5.2.02        | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 94.105.000               | 40.005.000,00               | 42,51             | 0,00           |
|               | <b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>       | <b>94.105.000</b>        | <b>40.005.000,00</b>        | <b>42,51</b>      | <b>0,00</b>    |
|               | <b>JUMLAH BELANJA</b>             | <b>3.790.461.926</b>     | <b>3.369.252.565,00</b>     | <b>88,89</b>      | <b>0,00</b>    |
|               | <b>SURPLUS/DEFISIT</b>            | <b>( 3.790.461.926 )</b> | <b>( 3.369.252.565,00 )</b> | <b>88,89</b>      | <b>0,00</b>    |

Kab. Barru, 10 Januari 2023  
Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
  
Drs. NASARUDDIN, M.Si  
NIP. 196508041986111002



Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN KAB. BARRU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022  
01 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022



| Kode Rekening     | URAIAN  | ANGGARAN 2022        | REALISASI 2022          | % 2022            | REALISASI 2021 |
|-------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| 1                 | 2   | 3                    | 4                       | 5 = (4 / 3) * 100 | 6              |
| <b>5</b>          | <b>BELANJA DAERAH</b>   | <b>3.790.461.926</b> | <b>3.369.252.565,00</b> | <b>88,89</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>5.1</b>        | <b>BELANJA OPERASI</b>  | <b>3.696.356.926</b> | <b>3.329.247.565,00</b> | <b>90,07</b>      | <b>0,00</b>    |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai   | 2.471.275.276        | 2.177.739.225,00        | 88,12             | 0,00           |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN  | 2.015.192.916        | 1.782.638.302,00        | 88,46             | 0,00           |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN  | 1.409.513.728        | 1.377.971.000,00        | 97,76             | 0,00           |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS  | 1.409.513.728        | 1.377.971.000,00        | 97,76             | 0,00           |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN  | 84.127.176           | 98.028.934,00           | 116,52            | 0,00           |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS  | 84.127.176           | 98.028.934,00           | 116,52            | 0,00           |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN   | 151.830.000          | 117.550.000,00          | 77,42             | 0,00           |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS   | 151.830.000          | 117.550.000,00          | 77,42             | 0,00           |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN  | 125.677.440          | 0,00                    | 0,00              | 0,00           |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS  | 125.677.440          | 0,00                    | 0,00              | 0,00           |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN   | 46.200.000           | 43.680.000,00           | 94,55             | 0,00           |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS   | 46.200.000           | 43.680.000,00           | 94,55             | 0,00           |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN   | 108.630.000          | 69.088.680,00           | 63,60             | 0,00           |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS   | 108.630.000          | 69.088.680,00           | 63,60             | 0,00           |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN  | 20.344.226           | 8.430.760,00            | 41,44             | 0,00           |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS  | 20.344.226           | 8.430.760,00            | 41,44             | 0,00           |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN   | 22.722               | 17.635,00               | 77,61             | 0,00           |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS   | 22.722               | 17.635,00               | 77,61             | 0,00           |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN   | 57.282.504           | 56.481.188,00           | 98,60             | 0,00           |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS   | 57.282.504           | 56.481.188,00           | 98,60             | 0,00           |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN  | 2.891.232            | 2.847.516,00            | 98,49             | 0,00           |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS  | 2.891.232            | 2.847.516,00            | 98,49             | 0,00           |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN  | 8.673.888            | 8.542.589,00            | 98,49             | 0,00           |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS  | 8.673.888            | 8.542.589,00            | 98,49             | 0,00           |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN  | 456.082.360          | 395.100.923,00          | 86,63             | 0,00           |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN  | 456.082.360          | 395.100.923,00          | 86,63             | 0,00           |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS  | 456.082.360          | 395.100.923,00          | 86,63             | 0,00           |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa   | 1.225.081.650        | 1.151.508.340,00        | 93,99             | 0,00           |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang  | 395.656.650          | 385.368.035,00          | 97,40             | 0,00           |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis  | 395.656.650          | 385.368.035,00          | 97,40             | 0,00           |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  | 263.547.800          | 256.411.800,00          | 97,29             | 0,00           |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover  | 12.212.500           | 11.704.000,00           | 95,84             | 0,00           |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   | 81.983.000           | 80.397.635,00           | 98,07             | 0,00           |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer   | 3.693.750            | 2.927.000,00            | 79,24             | 0,00           |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura   | 6.906.000            | 6.833.000,00            | 98,94             | 0,00           |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 26.087.600           | 25.868.600,00           | 99,16             | 0,00           |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 1.226.000            | 1.226.000,00            | 100,00            | 0,00           |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa  | 403.469.000          | 373.686.135,00          | 92,62             | 0,00           |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor   | 380.969.000          | 353.986.135,00          | 92,92             | 0,00           |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                            | 100.920.000          | 94.920.000,00           | 94,05             | 0,00           |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 174.000.000          | 169.000.000,00          | 97,13             | 0,00           |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 46.849.000           | 34.189.800,00           | 72,98             | 0,00           |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 42.000.000           | 42.000.000,00           | 100,00            | 0,00           |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah  | 10.000.000           | 10.000.000,00           | 100,00            | 0,00           |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  | 7.200.000            | 3.876.335,00            | 53,84             | 0,00           |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan              | 22.500.000           | 19.700.000,00           | 87,56             | 0,00           |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis  | 22.500.000           | 19.700.000,00           | 87,56             | 0,00           |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan  | 49.710.000           | 39.875.000,00           | 80,22             | 0,00           |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  | 49.710.000           | 39.875.000,00           | 80,22             | 0,00           |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 27.000.000           | 25.010.000,00           | 92,63             | 0,00           |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua       | 18.000.000           | 10.155.000,00           | 56,42             | 0,00           |
| 5.1.02.03.02.0404 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan                                       | 3.000.000            | 3.000.000,00            | 100,00            | 0,00           |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                       | 1.000.000            | 1.000.000,00            | 100,00            | 0,00           |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                        | 710.000              | 710.000,00              | 100,00            | 0,00           |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas  | 376.246.000          | 352.579.170,00          | 93,71             | 0,00           |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   | 376.246.000          | 352.579.170,00          | 93,71             | 0,00           |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  | 239.246.000          | 238.529.170,00          | 99,70             | 0,00           |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 137.000.000          | 114.050.000,00          | 83,25             | 0,00           |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>   | <b>3.696.356.926</b> | <b>3.329.247.565,00</b> | <b>90,07</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>5.2</b>        | <b>BELANJA MODAL</b>  | <b>94.105.000</b>    | <b>40.005.000,00</b>    | <b>42,51</b>      | <b>0,00</b>    |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 94.105.000           | 40.005.000,00           | 42,51             | 0,00           |

| Kode Rekening     | URAIAN                                     | ANGGARAN 2022            | REALISASI 2022              | % 2022       | REALISASI 2021 |
|-------------------|--|--------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 28.000.000               | 24.400.000,00               | 87,14        | 0,00           |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga            | 28.000.000               | 24.400.000,00               | 87,14        | 0,00           |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                        | 28.000.000               | 24.400.000,00               | 87,14        | 0,00           |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                     | 66.105.000               | 15.605.000,00               | 23,61        | 0,00           |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                | 66.105.000               | 15.605.000,00               | 23,61        | 0,00           |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer            | 50.500.000               | 0,00                        | 0,00         | 0,00           |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya        | 15.605.000               | 15.605.000,00               | 100,00       | 0,00           |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>                | <b>94.105.000</b>        | <b>40.005.000,00</b>        | <b>42,51</b> | <b>0,00</b>    |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA</b>                      | <b>3.790.461.926</b>     | <b>3.369.252.565,00</b>     | <b>88,89</b> | <b>0,00</b>    |
|                   | <b>SURPLUS/DEFISIT</b>                     | <b>( 3.790.461.926 )</b> | <b>( 3.369.252.565,00 )</b> | <b>88,89</b> | <b>0,00</b>    |

Kab. Barru, 15 Januari 2023  
 Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
 SIPD  
  
 Drs. NASARUDDIN, M.Si  
 NIP.196508041986111002

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri